

ASSESSMENT OF CORRUPTION FACTORS IN INDONESIA

By Rayhan Hidayat

Abstract

Corruption poses a significant challenge in Indonesia, impeding social, economic, and political development. This study aims to evaluate the key factors influencing corruption levels across 34 provinces in Indonesia during the 2022–2023 period using a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) approach with the PROMETHEE method. The analysis focuses on key indicators such as the Human Development Index (HDI), inflation, investment, population, education level, and wages. The findings reveal that provinces with higher education levels, controlled inflation, and strong HDI scores exhibit lower levels of corruption. Conversely, low wages, high population density, and suboptimal investment exacerbate corruption rates. Through the outranking method, 17 provinces were identified with positive Phi values, indicating relatively good performance, while 17 provinces recorded negative Phi values. This study provides strategic insights for policymakers to enhance governance, improve transparency, and promote economic equity to reduce corruption at the national level.

Keywords: *Economy, Governance, Inflation, Investment, Multi-Criteria Decision Making.*

ASSESSMENT FAKTOR TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA

Oleh Rayhan Hidayat

Abstrak

Korupsi menjadi tantangan serius di Indonesia karena menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik secara signifikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat korupsi di 34 provinsi Indonesia selama periode 2022-2023 menggunakan pendekatan *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) berbasis metode PROMETHEE. Analisis mencakup indikator utama seperti indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, investasi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat pendidikan tinggi, inflasi terkendali, dan IPM baik memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Sebaliknya, rendahnya tingkat upah, tingginya populasi, dan investasi yang tidak optimal memperburuk angka korupsi. Melalui metode *outranking*, ditemukan 17 provinsi dengan nilai Phi positif yang menunjukkan kinerja relatif baik, sementara 17 provinsi lainnya memiliki nilai Phi negatif. Penelitian ini menawarkan perspektif strategis untuk pengambil kebijakan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, dan mendorong pemerataan ekonomi guna menekan angka korupsi di tingkat nasional.

Kata Kunci : Ekonomi, Inflasi, Investasi, *Multi Criteria Decision Making*, Tata Kelola.